



## **Menguak Potensi Hasil Perikanan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Nelayan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kota Sibolga**

**Asrizal EfendyNasution**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia*

*Jl Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20221*

e-mail :rizalmedan28@gmail.com

---

### **ABSTRAK**

Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh – sungguh pada ekonomi rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi hasil perikanan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat nelayan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan di kota Sibolga. Metode yang digunakan adalah library research. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari BPS kota Sibolga. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa potensi hasil perikanan yang cukup besar bahkan penyumbang terbesar kedua setelah perdagangan besar dan eceran dari 17 indikator PDRB menurut lapangan usaha yang ada di kota Sibolga ternyata belum mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat nelayannya. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan di bidang perikanan. Untuk itu, pemerintah perlu lebih serius dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di bidang perikanan ini salah satunya adalah dengan pemberian bantuan modal dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan sehingga pendapatannya meningkat dan mampu mengangkat derajatnya keluar dari strata kemiskinan. Pendampingan dan pengarahannya yang intensif juga perlu dilakukan dalam penggunaan bantuan modal dan teknologi yang diberikan agar tujuan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini dapat tercapai.

**Kata Kunci : Hasil Perikanan, Kemiskinan, Ekonomi Kerakyatan**



## Revealing Potential of Fishery Products in Eradicating Poverty of Fishermen Society through People's Economic Empowerment in Sibolga City

### *ABSTRACT*

*Poverty is a living condition that is in shortage experienced by a person or household, so as not being able to meet the minimum or decent needs in his life. Populist economy is a family-based economic system, people's sovereignty, and shows a genuine interest in people's economy. This study aims to determine how the potential of fishery in poverty eradication of fishermen community through the empowerment of the populist economy in the city of Sibolga. The method used is library research. The data used are secondary data taken from the BPS Sibolga city. From the results of the discussion can be concluded that the potential of fishery products is quite large and even the second largest contributor after the big trade and retail of 17 indicators of GRDP according to existing business fields in the city of Sibolga was not able to alleviate the poverty of fishermen community. This is because not yet maximizing the economic empowerment of people in the field of fisheries. To that end, the government needs to be more serious in improving the empowerment of the populist economy in the field of fisheries is one of them is the provision of capital and technology assistance that can increase the productivity of fishing communities so that income increases and able to raise the degree out of the strata of poverty. Intensive facilitation and direction also needs to be made in the use of capital and technology assistance provided for the purpose of poverty alleviation through economic empowerment of this person can be achieved.*

**Keywords:** *Fishery Product, Poverty, Community Economy*

### PENDAHULUAN

Potensi sumber daya kelautan yang terhampar dilautan Sibolga cukup besar untuk diolah menjadi komoditi baik lokal maupun yang berskala ekspor. Dengan sarana dan prasarana yang ada sekarang ini, pengelolaan sumber daya kelautan tersebut bisa dikelola dan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan serta mampu mengangkat derajat perekonomian warga Sibolga, khususnya warga yang bekerja pada sektor perikanan ini, dimana jumlahnya cukup besar yaitu 3.955 orang atau 9,63% dari angkatan kerja yang ada sebanyak 41.055 orang (BPS Kota Sibolga, 2016).

Akan tetapi hasil dari potensi perikanan yang cukup besar bahkan telah berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah tersebut hanya bisa dinikmati oleh segelintir warga saja yaitu para pengusaha yang bergerak di sektor perikanan ini. Seyogyanya hasil sektor perikanan ini dapat dinikmati secara seimbang antara pemilik modal dengan para nelayan yang menjadi motor penggerak pada sektor perikanan ini.



Hal ini disebabkan oleh performance pembagian kerja dan pembagian hasil yang belum jelas ditambah lagi penerapan ekonomi kerakyatan yang belum maksimal, mengakibatkan pihak nelayan dan orang-orang yang bergantung pada sektor ini selalu dirugikan sehingga peningkatan taraf hidup para nelayan menjadi terkendala.

Jika kita mencoba menelusuri hasil produk perikanan ini dari tahun ke tahun, maka tampak dengan jelas bagaimana kenaikan hasil produk perikanan ini. Untuk bahan kajian, berikut akan disajikan perkembangan hasil perikanan dari beberapa tahun :

**Tabel 1**  
**Hasil Produksi Ikan di Kota Sibolga (Ton) Tahun 2012-2016**

<b>Triwulan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Triwulan I	13.138	13.666	13.757	13.623	12.700
Triwulan II	12.219	13.734	13.799	13.654	13.760
Triwulan III	13.807	13.185	13.730	13.684	15.230
Triwulan IV	13.530	13.317	13.593	13.137	13.150
<b>Jumlah/Total</b>	<b>52.694</b>	<b>53.902</b>	<b>54.880</b>	<b>54.098</b>	<b>54.840</b>

*Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga (SDA, 2017)*

Dan apabila volume hasil perikanan ini dinilai dalam rupiah atas dasar harga berlaku maka akan tergambar sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sibolga Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Hasil Produk Perikanan (Juta Rupiah) Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (Juta Rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan PDRB (%)</b>
2012	562.621,61	23,00%
2013	610.568,58	22,59%
2014	690.534,80	22,59%
2015	773.322,25	22,57%
2016	866.481,84	22,64%

*Sumber : BPS Kota Sibolga 2017*

Dan apabila kita melihat akumulasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 17 (tujuh belas) indikator menurut lapangan usaha dapat dilihat bahwa perikanan memberikan sumbangan terbesar kedua setelah perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar Rp. 866.481.840.000 dari total 17 lapangan usaha yang ada yaitu sebesar Rp. 3.827.166.270.000, yang artinya sektor perikanan memberikan kontribusi 22,64% dari bidang lapangan usaha yang ada (BPS/SDA, 2017).

Dari ketiga angka yang disajikan diatas, maka terlihat begitu besar potensi dari hasil perikanan kota Sibolga dimana seyogyanya potensi ini dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat nelayan itu sendiri. Fenomena ini selalu muncul dimana-mana bukan hanya disektor industri perikanan akan tetapi juga disektor manufaktur lainnya. Bagi sektor perikanan hal ini bisa timbul oleh karena tidak jelasnya performa pembagian kerja dan pembagian hasil, sehingga dalam hal ini pihak nelayan selalu dirugikan.



Dari data yang disebutkan sebelumnya bahwa jumlah tenaga kerja yang ada pada sektor perikanan jumlahnya cukup besar yaitu berkisar 10.908 orang dimana dari jumlah ini yang bekerja di kapal-kapal penangkapan ikan sebagai nelayan adalah 7.889 orang (BPS tahun 2016), sedangkan sisanya adalah yang bekerja sebagai pegawai ditangkahan ikan (tempat pendaratan ikan) dan juga orang-orang yang menggantungkan kehidupan di sektor perikanan ini sebagai pedagang asongan yang jumlahnya berkisar 1050 orang.

Begitu besarnya jumlah orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan ini dan kondisi ekonomi mereka masih hidup dalam strata kemiskinan. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis mencoba untuk memberikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan orang-orang yang bekerja pada sektor perikanan ini khususnya masyarakat nelayan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana potensi perikanan di kota Sibolga dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat nelayan melalui ekonomi kerakyatan.

## KAJIAN TEORI

Menurut Mubyarto (2004) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara.

Menurut Suharto (2005 : 131) adapun ciri-ciri dari kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang, pangan).
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti :
  - 1) Kesehatan
  - 2) Pendidikan
  - 3) Sanitasi
  - 4) Air bersih
  - 5) Transportasi
- c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun masal.
- e. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.



i. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial seperti :

- 1) Anak terlantar
- 2) Wanita korban tindak kekerasan rumah tangga (KDRT)
- 3) Janda miskin
- 4) Kelompok marjinal dan terpencil

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse 1953 dalam Mudrajad Kuncoro, (2003) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

b. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

c. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

### **Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nelayan**

Terdapat 5 (lima) masalah pokok terkait penyebab kemiskinan masyarakat nelayan, diantaranya:

- a. Kondisi Alam. Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.
- b. Tingkat pendidikan nelayan. Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah.



- c. Pola kehidupan nelayan. Pola hidup konsumtif menjadi masalah laten pada masyarakat nelayan, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder.
- d. Pemasaran hasil tangkapan. Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar.
- e. Program pemerintah yang belum memihak nelayan, kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kebijakan yang pro nelayan mutlak diperlukan, yakni sebuah kebijakan sosial yang akan mensejahterakan masyarakat dan kehidupan nelayan.

Kusnadi, (2009) mengidentifikasi sebab-sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan pada masyarakat nelayan :

- a. Belum adanya kebijakan dan aplikasi pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terintegrasi atau terpadu di antara para pelaku pembangunan.
- b. Mendorong pemda merumuskan blue print kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan secara terpadu dan berkesinambungan.
- c. Masalah isolasi geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar masuk barang, jasa, kapital, dan manusia. Berimplikasi melambatkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan.
- d. Keterbatasan modal usaha atau investasi sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikananannya.
- e. Adanya relasi sosial ekonomi "eksploitatif" dengan pemilik perahu dan pedagang perantara (tengkulak) dalam kehidupan masyarakat nelayan.
- f. Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, berdampak sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup.
- g. Kesejahteraan sosial nelayan yang rendah sehingga mempengaruhi mobilitas sosial mereka.

Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud membuat nelayan tetap dalam kemiskinannya.

Mulyadi (2007), mengajukan argumen bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya *opportunity cost* mereka. *Opportunity cost* nelayan, menurut definisi, adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain, *opportunity cost* adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila *opportunity cost* rendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien.



Sulistiowati,dkk (2007), mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (*preference for a particular way of life*). Pendapat Sulistiowati ini diartikan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena *way of life* yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. *Wayof life* sangat sukar dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.

### **Pengertian Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang di bangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bisa memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa berpartisipasi sehingga perekonomian tersebut bisa terlaksana dan dapat berkembang dengan baik.

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sebuah sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (*popular*) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan lain-lain yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat menjadi kunci pokok ekonomi kerakyatan. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Dumairy dan Nugroho (2014), sistem Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh – sungguh pada ekonomi rakyat.

Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (*network*) yang menghubungkan–hubungkan sentra – sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik diantara sentra dan pelaku usaha masyarakat.



## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi. Metode ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena. Metode yang digunakan adalah library research. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari BPS kota Sibolga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Potensi Perikanan dan Pengembangan Daerah Kota Sibolga

Rencana Strategis (Renstra) kota Sibolga yang menyangkut kebijaksanaan di bidang ekonomi diupayakan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan. Salah satunya dengan memberikan prioritas pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor perikanan dan perdagangan. Disamping itu menguatkan institusi pasar dan pemberdayaan pengusaha kecil dan koperasi.

Secara eksplisit kita lihat Rencana Strategis kota Sibolga ini dibidang ekonomi sangat signifikan mendorong dan menumbuh kembangkan sektor perikanan yang merupakan sektor terbesar kedua setelah perdagangan besar dan eceran dalam memberi kontribusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kota Sibolga. Jika kita melihat data potensi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka menjadi sebuah kewajaran apabila potensi ini diprimadonakan dalam mendorong pertumbuhannya karena boleh dikatakan sektor lain dependensi kepada sektor perikanan ini termasuk sektor perdagangan besar dan eceran.

Kontribusi yang cukup berarti dari tahun ke tahun (2012-2016) yang diberikan sektor ini dalam menopang pertumbuhan perekonomian di kota Sibolga seyogyanya juga memberikan peningkatan pendapatan kepada orang-orang yang bergerak di sektor perikanan ini terutama sekali kepada masyarakat nelayannya.

Pembangunan daerah kota Sibolga yang merupakan bagian terpadu dari pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual. Dengan kata lain, hakikat pembangunan daerah kota Sibolga adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara merata dan harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat (Bappeda Kota Sibolga Tahun 2016).

Potensi perikanan dan hubungannya kepada pembangunan daerah kota Sibolga mempunyai korelasi yang sangat erat ditinjau dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kota Sibolga. Sebagaimana diketahui bahwa potensi perikanan yang ada di perairan Pantai Barat Pulau Sumatera ini yang sebagian hasil tangkapannya didaratkan di kota Sibolga, belum lagi diolah secara optimal dimana dari potensi lestari yang bisa diolah dan didaratkan di kota Sibolga masih bisa ditingkatkan.

Dari data yang ada, ikan yang didaratkan di kota Sibolga rata-rata sebanyak 54. 083 ton per tahun. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa potensi ini masih bisa terus dikembangkan dalam arti ditingkatkan volume penangkapannya. Dalam hal ini perlu diperhatikan pengarahannya, pengaturan dan pedoman dalam rangka menciptakan kekuatan-kekuatan bagi perluasan dan pemeliharaan sumber-sumber biota laut.





Peningkatan volume hasil produk perikanan ini tentu saja diorientasikan kepada percepatan pembangunan daerah, mengingat potensi perikanan adalah merupakan potensi riil daerah ini. Maka untuk mewujudkan peningkatan pembangunan kota Sibolga melalui potensi perikanan ini telah disusun beberapa kebijakan-kebijakan yaitu :Pengembangan terhadap pengolahan hasil produk perikanan yang dapat memberikan nilai tambah secara optimal kepada masyarakat nelayan dan orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini secara terintegrasi (terpadu) yakni dengan meningkatkan keterampilan nelayan, bantuan teknologi dan modal usaha. Untuk menunjang hal ini maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan kelompok usaha nelayan yang juga termasuk ke dalam ekonomi kerakyatan.

- a. Meningkatkan iklim investasi yang mendukung peran serta masyarakat dalam pembangunan sektor perikanan ini.
- b. Membina dan memantau lembaga pengelolaan sumber daya kelautan yang tangguh dan baik agar pembangunan sarana penunjang produksi dan pengelolaan dapat dilakukan dengan sistematis dan terencana dengan baik.
- c. Meningkatkan kualitas produk perikanan disamping kuantitas produksinya agar dapat bersaing dalam pasar lokal regional maupun global (internasional).
- d. Meningkatkan daya saing produksi perikanan dengan usaha penelitian dan riset pengembangan teknologi pengelolaan ikan. (Catatan Dari Presentasi Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Daerah Kota Sibolga Tahun 1999).

Dari uraian diatas, kebijakan yang dibuat sangat signifikan dalam pengembangan sektor perikanan, hal ini ditujukan untuk peningkatan sektor perikanan dimana implikasinya adalah peningkatan pembangunan di kota Sibolga. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Sibolga tersebut akan berhasil apabila disinergikan dengan derap langkah para pengusaha yang bergerak di sektor perikanan ini. Kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta sangat diperlukan, dimana pemerintah melalui otoritas yang dimilikinya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemerintahan, dimana outputnya bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha dan umpan baliknya kepada pembangunan adalah adanya investasi-investasi baru yang dilakukan oleh para pengusaha.

Keterpaduan ini tentunya akan mendorong pertumbuhan dan akhirnya percepatan pembangunan itu sendiri, dimana percepatan pembangunan itu akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan dan kemakmuran masyarakat nelayan.

### **Program Pengembangan Ekonomi Rakyat Pada Sektor Perikanan di Kota Sibolga**

Krisis moneter dan krisis ekonomi yang menandai tumbangnya sistem ekonomi konglomerasi (era konglomerat) menandai munculnya sistem ekonomi rakyat atau yang sering disebut sebagai era ekonomi kerakyatan, dimana pada periode ini prioritas dari konsep ekonomi kerakyatan ini adalah pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan (pengentasan kemiskinan).

Ekonomi kerakyatan sangat jauh berbeda dengan ekonomi konglomerasi, dimana ekonomi kerakyatan berorientasi kepada kerjasama dalam memiliki dan mengaplikasikan faktor-faktor ekonomi, karena dengan kerjasama tujuan usaha dapat dicapai. Sedangkan ekonomi konglomerasi yang kapitalistis selalu mengandalkan cara bersaing, bahkan sampai saling mematikan (*free fight liberalism*) untuk mencapai keuntungan masing-masing.



Oleh karena itu, sifat usaha yang paling cocok dalam ekonomi kerakyatan ini adalah koperasi, dimana dalam kegiatan ini semua usaha dengan menggerakkan faktor-faktor ekonomi adalah merupakan usaha bersama.

Ekonomi kerakyatan adalah bagian besar dari cara-cara rakyat bergumul dan bertahan untuk menjaga kelangsungan kehidupannya, dipertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, dalam industri-industri kecil dan kerajinan serta dalam perdagangan atau kegiatan swadaya lainnya baik di pedesaan maupun diperkotaan (Rahardjo, 2004).

Pada sistem ekonomi kerakyatan ini persaingan sama sekali tidak ditabuhkan, akan tetapi persaingan tersebut tidak untuk saling mematikan (*free fight liberalism*). Posisi negara tetap pada posisi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak tetapi untuk menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara keseluruhan bukan orang perorang dan rakyat harus dapat bekerja sebagaimana mestinya untuk dapat hidup sebagaimana layaknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Mencermati konsep ekonomi kerakyatan yang disampaikan diatas, maka dalam penerapannya pada sektor perikanan di kota Sibolga harus mengacu kepada konsep tersebut, artinya pelaksanaan perekonomian disektor ini dapat memberikan kemakmuran yang merata sesuai dengan porsi dan kedudukannya. Jika bercermin kepada tingkat pertumbuhan perekonomian disektor perikanan ini tampak begitu signifikannya pertumbuhan tersebut akan tetapi pada tingkat pemerataan disini terjadi gap yang sangat dalam dimana para nelayan masih tetap berada pada strata kemiskinan.

Hal ini dapat kita lihat dan bandingkan antara pertumbuhan potensi perikanan dan sumbangannya kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Sibolga dengan income perkapita nelayan yang ada di kota Sibolga (Data tahun 2017). Dari data PDRB kota Sibolga menurut lapangan usahanya, total penerimaan keseluruhan bidang usahanya adalah sebesar Rp. 3.827.166.270.000,- sedangkan kontribusi dari bidang pertanian dimana sektor perikanan termasuk didalamnya sebagai penyumbang terbesar pada bidang pertanian adalah sebesar Rp. 866.481.840.000 atau sama dengan 22, 64% akan tetapi income perkapita masyarakat nelayan yang ada hanya berkisar Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 saja (BPS Kota Sibolga, 2017).

Melihat kondisi ini maka perlu sebuah pengkajian yang mendalam dan memprogramkan sistem ekonomi kerakyatan pada sektor ini, dimana program ini dapat menyentuh kehidupan nelayan yang ada di kota Sibolga. Sebelumnya telah disinggung kerjasama pemerintah dengan pihak swasta yang bersinergi sangat dibutuhkan dalam pembangunan ini. Memang dalam konteks pembangunan bahwa pada dasarnya pembangunan itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dimana masyarakat sebagai sasaran sekaligus pelaksana pembangunan sesuai dengan porsinya.



Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan disektor perikanan ini sangat ditentukan oleh keterpaduan program pembangunan, pembangunan masyarakat (nelayan) dan peran serta masyarakat secara keseluruhannya. Selain itu, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan harus pula diiringi dengan pelestarian hasil pembangunan itu sendiri. Untuk itu pemerintah harus memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan disektor perikanan ini dimana sumber dananya sangat diharapkan dari bantuan pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan lainnya sehingga pembangunan disektor perikanan ini akan menunjukkan perkembangannya.

Maka untuk itu, program pembangunan ekonomi rakyat pada sektor perikanan ini harus memperhatikan beberapa elemen-elemen dibawah ini :

- a. Bantuan modal
- b. Pembangunan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan ekonomi
- c. Pelatihan guna meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi
- d. Mengupayakan suatu lembaga bagi pelaksanaan ekonomi kerakyatan.

Keempat elemen tersebut harus dilaksanakan secara terpadu (terintegrasi), karena apabila elemen-elemen tersebut dilaksanakan secara parsial maka akan dikhawatirkan akan terjadi stagnasi dan berakibat kepada gagalnya program pengembangan ekonomi rakyat tersebut.

Bantuan modal adalah hal yang sangat mendasar sekali dalam elemen ini karena diketahui bahwa pada dasarnya konsep ekonomi kerakyatan ini adalah sistem ekonomi yang dilakoni oleh lapisan masyarakat menengah dan bawah, dimana diketahui bahwa masyarakat pada kondisi ini adalah sangat kekurangan modal usaha. Maka dengan bantuan modal ini kegiatan-kegiatan ekonomi akan dapat digerakkan. Modal ini akan mempunyai makna apabila sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan ekonomi rakyat tersebut tersedia.

Selanjutnya untuk menghasilkan hasilguna dan dayaguna produk yang dihasilkan, maka perlu pula ditopang oleh sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan handal dalam lembaga yang dapat mengakomodir kegiatan ekonomi tadi yang kita sebut sebagai ekonomi kerakyatan. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa elemen-elemen yang menopang gerakan ekonomi kerakyatan ini seharusnya tidak diaplikasikan secara parsial akan tetapi harus secara terintegrasi.

Oleh karena itu peran serta unsur-unsur yang dapat menampung terlaksananya ekonomi kerakyatan ini harus bergerak dan bekerja secara sinergi dan optimal apakah itu pemerintah, institusi ekonomi maupun masyarakat yang terlibat dan peduli kepada konsep ekonomi kerakyatan tersebut.

### **Potensi Perikanan dan Implementasinya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Nelayan Di Kota Sibolga**

Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu proses perubahan dari ketergantungan kepada kemandirian (Hamid, 2005). Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dimaknai sebagai sebuah proses perubahan ketergantungan masyarakat kepada ketergantungan faktor-faktor ekonomi yang dimiliki orang lain dan berupaya untuk memilikinya.



Konsep pemberdayaan masyarakat ini adalah bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam kehidupan sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat yang telah diberdayakan tersebut dapat hidup secara layak dan tidak lagi berada pada strata kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat sangat identik dengan konsep pengentasan kemiskinan dimana hal ini telah menjadi sebuah fenomena di negara-negara yang sedang berkembang. Kajian terhadap kemiskinan ini adalah sangat menonjol pada akhir-akhir ini sehingga G.M.Meier dan R.E. Baldwin mengatakan bahwa “Pengkajian mengenai kemiskinan bangsa-bangsa bahkan lebih mendesak daripada pengkajian kemakmurannya (ML. Jhingan, 2010).

Demikian pentingnya kajian masalah kemiskinan ini, karena hal ini adalah hal yang sangat esensi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagaimana telah dibahas pada landasan teoritis bahwa ada 3 (tiga) kategori kemiskinan yaitu : kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Dari ketiga bentuk kemiskinan tersebut, maka kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif sangat mendominasi bentuk kemiskinan di kota Sibolga.

Berbicara masalah kemiskinan, sebuah teori yang dikembangkan oleh R. Nurkse dalam bukunya “*Problem of Capital Formation in under developed country*”, dia mengatakan bahwa kondisi kemiskinan itu dimulai dari ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan dan ketertinggalan. Ini semua adalah merupakan faktor-faktor eksternal sebagai pemicu munculnya kemiskinan itu sendiri.

Sedangkan faktor internalnya adalah kurangnya modal yang berimplikasi kepada rendahnya produktivitas dan hal ini menyebabkan pendapatan (*income*) riil yang rendah pula sehingga pada kondisi ini tingkat saving menjadi rendah dan akhirnya investasipun rendah. Alur ini berputar terus menjadi sebuah lingkaran yang tidak pernah putus-putusnya apabila permasalahan ini tidak dipecahkan secara serius. Upaya untuk memecahkan masalah ini tidak lain adalah dengan cara memutus tali rantai kemiskinan itu sendiri, dimana faktor-faktor internal dan eksternal penyebab kemiskinan tersebut harus diatasi.

Mencermati kondisi siklus kemiskinan tersebut, maka pemerintah telah membuat kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan ini yang dituangkan dalam 4 (empat) pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang meliputi :

1. Menciptakan lapangan kerja
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia
4. Perlindungan sosial

Apabila keempat pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan ini yang merupakan sistem atau cara penanggulangan kemiskinan kita korelasikan dengan kondisi riil potensi kota Sibolga, maka kebijakan tersebut diatas adalah merupakan sebuah terapi dalam mengentaskan kemiskinan di kota Sibolga. Berikut ini disajikan data keluarga prasejahtera (pada strata kemiskinan) dan keluarga sejahtera di kota Sibolga berdasarkan kecamatan yang ada :



Tabel 3

**Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan  
Klasifikasi Keluarga di Kota Sibolga 2016**

Kecamatan	Keluarga Prasejahtera	Keluarga Sejahtera (Triwulan)				Jumlah Total
		I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sibolga Utara	709	1.383	425	2.106	80	4.703
Sibolga Kota	157	942	541	1.669	87	3.396
Sibolga Selatan	756	1.955	577	3.140	148	6.576
Sibolga Sambas	256	2.344	131	1.824	110	4.665
<b>Sibolga</b>	<b>1.878</b>	<b>6.624</b>	<b>1.674</b>	<b>8.739</b>	<b>425</b>	<b>19.340</b>

Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sibolga (SDA,2017)

Dari data yang ada bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang termasuk dalam keluarga prasejahtera atau berada dalam strata kemiskinan sebanyak 1.878 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yang ada di kota Sibolga :

1. Kecamatan Sibolga Selatan berjumlah 756 Kepala Keluarga (KK)
2. Kecamatan Sibolga Sambas berjumlah 256 Kepala Keluarga (KK)
3. Kecamatan Sibolga Kota berjumlah 157 Kepala Keluarga (KK)
4. Kecamatan Sibolga Utara berjumlah 709 Kepala Keluarga (KK)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa keluarga yang paling banyak berada pada strata kemiskinan adalah di kecamatan Sibolga Selatan yaitu berjumlah 756 kepala keluarga. Apabila kita mencoba melihat penyebaran penduduk yang bekerja di sektor perikanan, maka penyebaran tersebut banyak berada di kecamatan Sibolga Selatan dan kecamatan Sibolga Sambas dimana pada kecamatan ini banyak sentra-sentra usaha perikanan (tangkahan ikan). Tetapi mengapa justru pada kecamatan ini pula yang paling banyak keluarga prasejahteranya. Ini menunjukkan bahwa potensi perikanan di kecamatan tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan 4 (empat) pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Sibolga, maka kebijakan tersebut dapat diterapkan dan dikorelasikan dengan potensi riil yang ada dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat nelayan. Salah satunya adalah dengan penciptaan lapangan kerja.

Penciptaan lapangan kerja disektor ini adalah dengan memberikan bantuan modal kepada para nelayan terutama sekali nelayan tradisional dan nelayan berskala kecil yang jumlahnya cukup besar, dimana bantuan modal ini diberikan secara kolektif sehingga akumulasi modal ini akan menjadi besar dan kuat. Pemberian bantuan modal ini tentu memerlukan pengkajian dan aturan main yang jelas.

Bantuan yang diberikan kepada para penerima harus tepat sasaran dan dapat terus dikembangkan. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :



1. Pemberian bantuan modal tersebut harus dilakukan secara mudah dan dapat digunakan oleh masyarakat yang bergerak di bidang perikanan atau dengan kata lain pemberian bantuan modal tersebut harus bersifat *acceptable*.
2. Bantuan modal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada yang memberikan bantuan itu sendiri maupun kepada publik (*accountable*). Maksudnya adalah bahwa pada umumnya sumber dana bantuan ini berasal dari lembaga publik apakah itu pemerintah, lembaga keuangan maupun BUMD atau BUMN.
3. Bahwa pengelolaan bantuan modal ini ditujukan kepada usaha perikanan yang bisa mendatangkan profit yang memadai dan pengelolaan modal ini dapat dilaksanakan secara ekonomis (*Cost Economical Profit*) atau dengan kata lain kegiatan ini bersifat *profitable*.
4. Kegiatan pengelolaan bantuan modal ini harus bersifat berkesinambungan sehingga profit usaha menjadi saving untuk kemudian dirubah menjadi investasi dan selanjutnya investasi akan menjadi penempatan modal baru dan seterusnya bersifat *sustainable*.
5. Akhirnya pengelolaan bantuan modal akan dapat digulirkan dan dilestarikan serta dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri (*replicable*).

Konsep tersebut diatas merupakan konsep meningkatkan kemampuan masyarakat (*capacity building*) yang tentu hal ini akan bisa terlaksana dengan baik apabila potensi tempat dimana modal tersebut ditempatkan dapat mendukung. Apabila dikorelasikan dengan potensi perikanan yang ada, maka tentu saja hal ini akan bisa berjalan dengan baik, karena dapat kita lihat bahwa dengan potensi yang ada sekarang ini yang begitu besar maka optimalisasi produk akan bisa dicapai.

Keterpaduan konsep kebijakan pemerintah secara nasional dalam pengentasan kemiskinan dan konsep pemerintah kota Sibolga yang dituangkan dalam “Matra Gerbang Sibolga Nauli” dimana salah satu konsep tersebut meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana perekonomian dan industri serta pengembangan industri kemaritiman dan pariwisata, maka dengan strategi pemberian bantuan modal yang telah diuraikan diatas maka penulis yakin pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat disektor perikanan ini akan membuahkan hasil.

Disamping itu koordinasi dan keterpaduan antar lembaga yang ada akan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ini baik kemiskinan absolut, kemiskinan relatif maupun kemiskinan kultural yang mana ketiga bentuk kemiskinan ini masih banyak ditengah-tengah masyarakat nelayan yang ada di kota Sibolga.

Maka untuk itu diperlukan keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi berskala kecil termasuk di dalamnya usaha koperasi, agar usaha-usaha ini tidak tertinggal jauh meskipun era globalisasi saat ini telah merasuk ke dalam kehidupan masyarakat nelayan. Melalui momentum globalisasi ini harus dapat dimanfaatkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi itu sendiri khususnya di kota Sibolga Nauli ini.

## KESIMPULAN

1. Potensi riil ekonomi kota Sibolga adalah pada sub sektor perikanan dimana potensi ini terbesar kedua dalam memberi kontribusi kepada pembangunan daerah kota Sibolga.



2. Bentuk kemiskinan yang ada ditengah-tengah masyarakat nelayan kota Sibolga adalah kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif sedangkan kemiskinan kultural boleh dikatakan hampir tidak ada.
3. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang dilakoni oleh masyarakat yang dapat mendorong peningkatan pendapatan yang diharapkan dapat mengangkat derajatnya keluar dari garis kemiskinan.
4. Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bergerak dan terlibat pada sektor perikanan ini dibutuhkan bantuan modal dan teknologi yang disertai petunjuk-petunjuk yang jelas, teratur dan terarah.
5. Keterpaduan dan kerjasama segala pihak dalam mendorong ekonomi kerakyatan ini sangat dibutuhkan untuk memberhasilkan misi ekonomi kerakyatan itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sibolga, 2017, *Sibolga Dalam Angka*, Provinsi Sumatera Utara.
- BPS/BAPPEDA Kota Sibolga, 2016, *Sibolga Dalam Angka*, Provinsi Sumatera Utara.
- BPS Kota Sibolga, 2017, *Sibolga Dalam Angka*, Provinsi Sumatera Utara.
- BPS Kota Sibolga, 2017, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2012-2016*, Provinsi Sumatera Utara.
- Catatan Presentase, *Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Daerah Tingkat II Kotamadya Sibolga Tahun 1999*, Sibolga : Sumatera Utara.
- Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga, 2017, *Sibolga Dalam Angka*.
- Dumairy, Nugroho Tarli, 2014, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamid, Edy Suandi, 2005, *Ekonomi Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Kusnadi, 2009, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir : Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Lembaga Penelitian Universitas Jember, Jember.
- ML., Jhingan, 2010, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Cetakan Ke-13, Rajawali Press, Jakarta.
- Mubyarto, 2004, *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2003, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2007, *Polemik Kemiskinan Nelayan*, Pustaka Jogya Mandiri, Yogyakarta.
- Rahardjo, M. Dawam, 2004, *Ekonomi Pancasila : Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adildan Makmur*, Aditya Media Bekerjasama Dengan PUSTEP UGM, Yogyakarta.
- Suharto Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Cetakan Ke-3, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Sulistiowati, Sumarjono, dkk, 2007, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta.